

## PENGARUH TINGKAT KONTRIBUSI PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMDA KABUPATEN MIMIKA

Sally Y.B. Lawalata  
[sally.timika21@gmail.com](mailto:sally.timika21@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to see the effect of the level of contribution of local revenue (PAD), Transfer Funds on Capital Expenditures in the Regional Government of Mimika Regency during the period 2011-2022 with the method of analysis technique used is regression error correction model (ECM), The results showed the level of contribution of local revenue had no effect in the long term, but had a significant effect in the short term on capital expenditure as shown by the T-Statistic value of 2.753 with p-value <0.05. Meanwhile, the Transfer Fund has a significant effect both in the long term with a T-Statistic value of 1.457 and for the short term has a T-Statistic value of 4.292 with a p-value < 0.05 Where for the R-Square value for the long term of 0.828 or 82.8% and for the short term has an R-Square value of 0.769 or 76.9%.*

**Keywords:** PAD Contribution Rate, Transfer Funds, Capital Expenditure

### **PENDAHULUAN**

Dalam konteks melihat pembangunan suatu daerah, yang dilakukan oleh regulasi atau kebijakan pemerintah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sehingga sebagai salah satu instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan melalui otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, Serta sebagai sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, Secara teoritis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Jhony dan Joonie,2011) mengemukakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah,dimana secara operasionalnya kemampuan keuangan daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk

melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Meskipun dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan untuk pembangunan dan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Ruth dalam Miswar, 2013).

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki capaian pendapatan daerah yang cukup tinggi dengan rata-rata pendapatan asli daerah sebesar Rp 388.93 miliar per-tahun, dengan total rata-rata penerimaan daerah sebesar Rp. 2.541.66 triliun. Adanya perkembangan PAD dan capaian penerimaan daerah yang cukup tinggi yang terlihat pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja sangat baik dalam memaksimalkan potensi daerah yang berupa sumber daya alam melalui alokasi anggaran belanja modal dan tunjangan dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan daerahnya.

Oleh karena itu, dengan kondisi faktual yang ada pada Kabupaten Mimika, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi keunggulan APBD untuk alokasi dengan faktor-faktornya secara optimalisasi dalam menentukan sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti efisiensi pengalokasian pendapatan asli daerah, dana transfer dan belanja modal dalam memaksimalkan penerimaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), dan Dana Transfer terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

**Tabel 1.**  
**Perkembangan PAD dan Penerimaan Daerah Kabupaten Mimika**  
**2011-2022 (Rp Milliar)**

<i>Tahun</i>	<i>PAD</i>	<i>Penerimaan Daerah</i>
2011	126.99	1,301.65
2012	344.62	1,350.58
2013	138.72	1,433.04
2014	202.19	1,755.08
2015	332.18	2,169.92
2016	305.37	2,611.66
2017	366.47	1,879.36
2018	342.13	3,027.52

Tahun	PAD	Penerimaan Daerah
2019	310.71	3,035.21
2020	311.45	2,386.41
2021	891.29	4,439.35
2022	995.09	5,110.10
<b>Rerata</b>	<b>388.93</b>	<b>2,541.66</b>

Sumber: Kemenkeu APBD Kab.Mimika 2022 (data diolah)

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Dalam PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Pada penelitian Darwanto dan Yustikasari (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Artinya bahwa apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya, Dengan kata lain peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dari pemaparan teoritis yang ada maka hipotesisi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Tingkat Kontribusi PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal**

### Hubungan Dana Transfer dengan Belanja Modal

Dalam penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), mengemukakan tujuan dari transfer terhadap belanja modal memiliki hubungan yaitu untuk mengurangi perbedaan keuangan

dan kemampuan pendanaan antar-daerah, dimana dengan cara ini maka pemberian dana transfer yang diberikan dalam bentuk DAU dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Artinya semakin besar alokasi dana transfer yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah yang dapat dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah.

Dari pemaparan teoritis yang ada maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal**

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Jenis Data Penelitian**

Penelitian ini berlokasi pada Kabupaten Mimika Provinsi Papua dengan jenis data sekunder yang bersumber dari instansi-instansi terkait dengan variabel yang diteliti yaitu, Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Belanja Modal selama periode 2011-2022.

### **Definisi Operasional dan pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independent (X) yaitu Tingkat Kontribusi PAD yang diukur dengan metode persentase dari pembagian total nilai pendapatan asli daerah dibagi dengan keseluruhan total penerimaan daerah dalam struktur APBD, kemudian untuk Dana transfer diukur dari penjumlahan keseluruhan pos alokasi dana transfer yang terdiri dari DAU, DAK, DBH serta pendapatan dana lainnya yang dijabarkan dalam struktur APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Untuk variabel dependent (Y) dalam penelitian ini terdiri dari alokasi belanja modal yang dicatumkan pada struktur APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selama tahun periode berjalan.

## Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menampilkan data secara tabel maupun grafis dan kemudian metode analisis Regresi ECM (*Error Corection Model*) untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Greene,2017)

Adapun persamaan untuk model regresi ECM dalam penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut:

### 1. Model Regresi Jangka Panjang

$$\text{LogBM}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LogTKPD}_t + \beta_2 \text{LogDTF}_t + e_t$$

### 2. Model Regresi Jangka Pendek

$$\text{DLOGBM}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{DLOGTKPD}_t + \beta_2 \text{DLOGDTF}_t + \text{ECT}_{-1} + e_t$$

Keterangan :

- BM : Belanja Modal (Y)
- TKPD : Tingkat Kontribusi PAD (X1)
- DTF : Dana Transfer (X2)
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \dots$  : Koefisien Regresi
- ECT : *Error Corection Time*
- (t-1) : *time lag periode sebelumnya*
- t : *Time series*
- LOG : Logaritma
- e : *Eror Term*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik digunakan karena dalam penelitian ini jenis data runtut waktu (time series) sehingga pengujian asumsi klasik perlu dilakukan yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Heterokedasitas, Uji Multikolineritas, dan Uji Autokorelasi. Hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa seluruh kriteria pengujian lolos secara asumsi klasik.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Asumsi Klasik	Nilai	Keterangan
Normalitas	Jarque-Bera = 0.437 <i>P-value</i> > 0.05	Data Terdistribusi Normal
Heterokedasitas	Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey <i>Obs*R-Square</i> = 0.287650 <i>P-Value</i> > 0.05	Tidak mengalami heterokedasitas
Multikolinieritas	VIF TKPD = 1.419 < 10 VIF DTF = 1.601 < 10	Tidak mengalami multikolinieritas
Autokorelasi	Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: <i>Obs*R-Square</i> = 1.074 <i>P-Value</i> > 0.05	Tidak mengalami autokorelasi

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

### Derajat Desentralisasi Fiskal

Dalam penelitian ini pengukuran derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatannya yang diukur dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah yang diterima selama periode tahun berjalan (Halim,2011). Adapun kriteria penetapan derajat desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
0.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.00 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Halim 2011

Dimana dari tabel 3 untuk penjelasan derajat desentralisasi fiskal pada Kabupaten Mimika selama periode 2011-2022 dapat dijelaskan bahwa untuk rata-rata derajat desentralisasi fiskal berdasarkan hasil perhitungan rata – rata memiliki nilai derajat sebesar 14.76 % artinya bahwa untuk kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan kontribusi pendapatan daerah dalam pembiayaan kegiatannya melalui total pendapatan yang diterima masih kurang dan belum maksimal, meskipun secara trend yang terlihat pada Gambar 1. menjelaskan Kabupaten Mimika memiliki nilai derajat tertinggi dengan kategori

cukup pada tahun 2012 dengan angka derajat sebesar 25.52 % dan pada tahun 2020 sebesar 20.08%.

**Kinerja Otonomisasi Daerah**

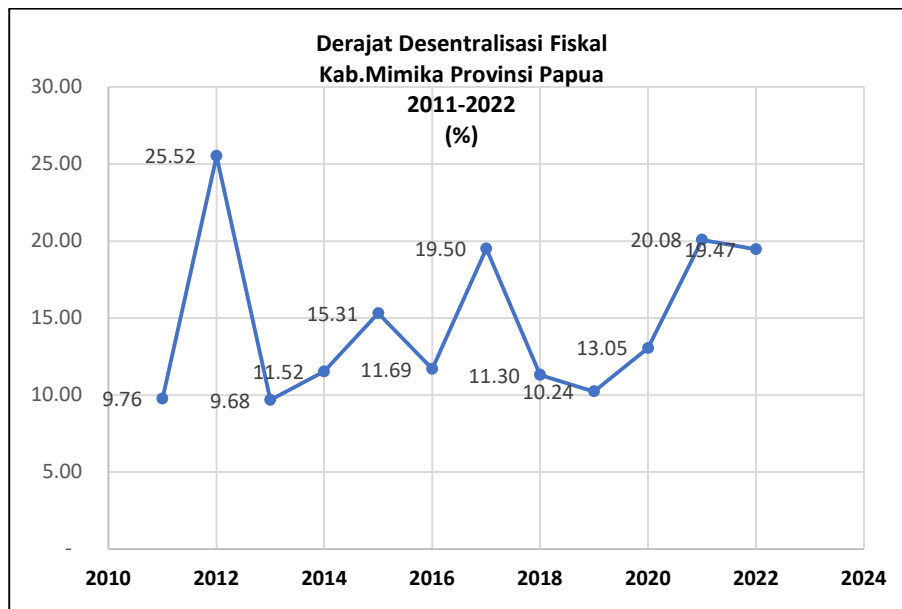
Dalam penelitian kinerja otonomisasi daerah digunakan untuk melihat seberapa besar efektifitas kinerja pemerintah dalam memenuhi target biaya atau anggaran yang direncanakan dengan realisasi biaya yang dijalankan dalam struktur APBD selama periode tahun berjalan (Halim,2011). Adapun pengukuran kinerja otonomisasi berdasarkan variabel yang diteliti yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (DAU, DAK, DBH dan Dana Penyesuaian) dan Belanja Modal dengan kriteria pada Tabel 4 dibawah ini.

**Tabel 4.**  
**Skala Kinerja Otonomisasi Daerah**

Skala	Keterangan
00.20 – 50.00	Sangat Tidak Efektif
51.00 – 70.00	Tidak Efektif
71.00 - 90.00	Cukup
91.00 – 100.00	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Halim 2011

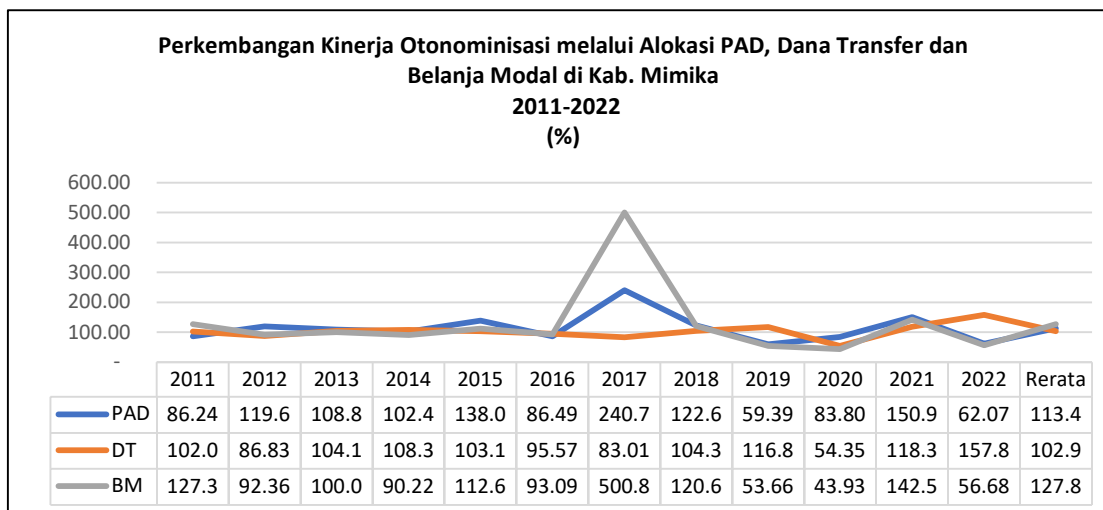
**Gambar 1.**  
**Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Mimika Provinsi Papua 2011-2022**



Sumber: Kemenkeu APBD Kab.Mimika (Data diolah,2022)

Untuk Kinerja Otonomisasi Daerah terlihat pada hasil analisis pada Gambar 2 yang menunjukkan bahwa perkembangan kinerja otonomisasi daerah untuk pendapatan asli daerah, dana transfer serta belanja modal pada struktur APBD Kabupaten Mimika, secara trend menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti memiliki nilai rata-rata kinerja otonomisasi berada pada kategori sangat efektif, dengan nilai untuk PAD sebesar 113.4%, Dana Transfer sebesar 102.9% dan Belanja modal sebesar 127.8%. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa secara fluktuasi pergerakan PAD, Dana Transfer memiliki perkembangan yang meningkat seiring dengan alokasi belanja modal. Artinya bahwa dalam pengalokasian anggaran terdapat pengaruh yang sangat efektif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana transfer serta belanja modal dalam pembiayaan kegiatan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Mimika selama periode 2011-2022.

**Gambar. 2**  
**Perkembangan Kinerja Otonomisasi Kab. Mimika 2011-2022**



Sumber: Kemenkeu APBD Kab.Mimika (Data diolah,2022)

### Deskriptif Statistik

Dalam penelitian ini deskriptif statistik digunakan untuk menjelaskan sebaran data berdasarkan variabel penelitian dengan pengukuran nilai rata-rata, minimum dan maksimum. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:



**Tabel 5.**  
**Deskriptif Statistik**

	<b>TKPD</b>	<b>DTF</b>	<b>BM</b>
Mean	14.75935	2263.243	635.2208
Median	12.37177	2082.480	644.3000
Maximum	25.51644	4256.540	1154.330
Minimum	9.680121	1005.960	288.1700
Std. Dev.	5.179032	1068.225	270.3518
Sum	4667.210	27158.92	7622.650
Sum Sq. Dev.	812867.4	12552146	803991.0

Sumber: Hasil Olahan Data,2022

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa untuk variabel tingkat kontribusi PAD (TKPD) memiliki nilai rata-rata sebesar 14.75% dengan total dana Rp. 388 miliar, kemudian untuk Dana Transfer (DTF) sebesar Rp. 2.264 triliun dengan rata-rata alokasi belanja sebesar Rp. 635.220 miliar, dimana jika dilihat dari segi struktur pembiayaan APBD mencerminkan meningkatnya pendapatan asli daerah secara positif diikuti dengan besarnya dana transfer yang dialokasikan untuk belanja modal pada Kabupaten Mimika selama periode 2011-2022.

### Uji Stasioneritas

Dalam penelitian ini pengujian stasioneritas data digunakan untuk melihat apakah sebaran data dalam variabel-variabel mengalami stasioneritas pada tingkat derajat level dengan pengujian akar unit menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller test statistic*. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Stasioner**

Variabel	<i>Augmented Dickey-Fuller test statistic</i>			
	Derajat Level		1 <sup>st</sup> Difference	
	T-Statistic	Prob*	T-Statistic	Prob*
LOGBM	-1.649479	0.4270	-3.933366	0.0194
LOGTKPD	-4.190059	0.0102	-6.413105	0.0006
LOGDTF	-0.636914	0.8142	-5.801098	0.0018

Sumber : Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 6 menunjukkan bahwa secara keseluruhan data dalam variabel penelitian terstasioner secara baik pada derajat 1<sup>st</sup> Difference dengan nilai *p-value* < 0.05.

## Uji Kointegrasi

Pengujian kointegrasi dalam penelitian ini digunakan untuk memberi indikasi bahwa untuk model regresi *Error Correction Model* yang digunakan terkointegrasi secara jangka panjang ataupun jangka pendek dengan metode pengukuran *Augmented Dickey-Fuller test statistic* untuk tingkat derajat level. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Kointegrasi**

Cointegration	<i>Augmented Dickey-Fuller test statistic</i>			
	Derajat Level		1 <sup>st</sup> Difference	
	T-Statistic	Prob*	T-Statistic	Prob*
ECT	-2.176273	0.2234	-3.355987	0.0404

Sumber : Hasil Olahan Data 2022

Berdasarkan hasil pengujian kointegrasi pada tabel.7 dapat dijelaskan bahwa untuk nilai *Error Correction Time* (ECT) terkointegrasi pada derajat 1<sup>st</sup> *Diffrence* dengan nilai p-value < 0.05. Sehingga secara model regresi ECM yang digunakan dapat jelaskan dalam bentuk model jangka Panjang maupun jangka pendek.

## Regresi ECM (*Error Correction Model*)

Dalam penelitian ini hasil regresi model ECM digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent dengan mempertimbangkan pengaruh *time-lag* pada data secara runtut waktu untuk keseimbangan jangka panjang maupun jangka pendek (Greene,2017). Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini.

**Tabel 8.**  
**Hasil Model Regresi ECM**

Regresi ECM (Error Correction Model)				
Jangka Panjang				
Variabel	Koefisient	Std.Error	T-Statistik	Prob*
Constanta	-0.364522	0.481706	-0.756730	0.4686
LOGTKPD	0.279696	0.191840	1.457962	0.1788
LOGDTF	0.847937	0.134455	6.306456	0.0001
F-Statistik	21.79183			0.0003
R-Square	0.828844			
Jangka Pendek				
Variabel	Koefisient	Std.Error	T-Statistik	Prob*
Constanta	-0.015650	0.032352	-0.483731	0.6433
DLOGTKPD	0.414068	0.150377	2.753540	0.0284
DLOGDTF	1.102354	0.256803	4.292599	0.0036
ECT(-1)	-0.758941	0.380508	-1.994548	0.0863
F-Statistik	7.802217			0.0123
R-Square	0.769787			

Sumber: Hasil Olahan Data 2022

## 1. Persamaan Regresi ECM Jangka Panjang

$$\text{LogBM}_t = 0.3645 - 0.279\text{LogTKPD}_t + 0.847\text{LogDTF}_t + e_t$$

## 2. Persamaan Regresi ECM Jangka Pendek

$$\text{DLOGBM}_t = 0.01565 + 0.414\text{DLOGTKPD}_t + 1.102\text{DLOGDTF}_t - 0.758 \text{ECT}_{-1} + e_t$$

**PEMBAHASAN****Pengaruh Tingkat Kontribusi PAD Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan dalam keseimbangan jangka panjang namun secara jangka pendek berpengaruh secara signifikan dan bersifat positif dalam mempengaruhi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis dan penelitian terdahulu yang dikemukakan bahwa tingkat kontribusi PAD berpengaruh secara positif, Dimana semakin besar penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah maka akan mempengaruhi alokasi belanja modal dari segi permintaan seperti pembangunan infrastruktur kualitas layanan publik, (Darwanto dan Yustikasari, 2014). Sehingga jika diamati secara signifikan dalam jangka pendek apabila rata-rata kontribusi PAD sebesar 14.75% dengan nilai sebesar Rp. 388 miliar maka menimbulkan pengaruh terhadap alokasi anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 31.473 miliar dalam artian secara asumsi ceteris paribus setiap perubahan tingkat kontribusi PAD sebesar 1% akan mempengaruhi belanja modal secara signifikan.

**Pengaruh Dana Transfer Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Transfer berpengaruh secara positif dan signifikan baik dalam keseimbangan jangka panjang maupun jangka pendek, Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian terdahulu yang dikemukakan (Permatasari dan Mildawati, 2016) adanya pengaruh positif dari alokasi dana transfer terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa semakin besar alokasi dana transfer yang diberikan, maka

semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah yang dapat dikelola secara efektif terhadap pembangunan suatu daerah. Sehingga jika diamati secara asumsi *ceteris paribus* apabila terjadi setiap perubahan sebesar 1% dari rata-rata alokasi dana transfer daerah sebesar Rp. 2.263.miliar , maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi belanja modal sebesar Rp. 3.07 miliar dan dalam jangka pendek sebesar Rp. 6.902 miliar, hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana transfer yang terdiri dari DAU,DAK,DBH dan Dana pendapatan lainnya sangat memiliki pengaruh dalam alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Mimika.

### SIMPULAN

Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh dalam jangka panjang, namun berpengaruh secara positif dalam jangka pendek dan signifikan terhadap Belanja Modal, Kemudian untuk Dana Transfer berpengaruh secara signifikan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Sehingga saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini untuk pemerintah setempat perlu melakukan Teknik efisiensi dalam melakukan serta merencanakan alokasi anggaran dalam setiap porsi APBD baik berupa PAD, Dana Transfer maupun Belanja Modal dapat terlaksana secara efektif untuk menciptakan penerimaan daerah yang maksimal dalam peningkatan kualitas publik di Kabupaten Mimika.

### DAFTAR PUSTAKA

- Darwanto., 2014 Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publising, Malang.
- Halim., 2011 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 2011*
- Greene, William H. 2017. *Econometric Analysis*. Pearson Education Limited

- Jhony., 2011 *Poses Penyusunan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah Dan Arah Kebijakan Umum*
- Kemenkeu., 2022. *Laporan APBD Daerah Kabupaten Mimika 2022*
- Mardiasmo., 2002 *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Milidawati., 2016 *Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(3), 1-17.
- Miswar., 2013 *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012* *Program Studi Magister Ilmu Pembangunan Universitas Sumatra Utara Medan 2013*
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*